

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA WISATA CIKAKAK KECAMATAN
WANGON KABUPATEN BANYUMAS**

Ayu Vela Handayani, Maesaroh, Nina Widowati

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Banyumas Regency is one of the active districts in accelerating the tourism industry. Cikakak Tourism Village is the only tourism village with an advanced category in Banyumas Regency. This is proven through the Decree of the Banyumas Regent Number /556/166/Year 2020. Management in the development of the Cikakak Tourism Village involves direct community participation to empower the community which aims to realize community independence. The purpose of this research is to find out the stages of community empowerment in the management of Cikakak Tourism Village and the inhibiting factors for the implementation of community empowerment in the management of Cikakak Tourism Village. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. The research site is Cikakak Tourism Village. Data collection techniques in this study through in-depth interviews, observation, and documentation. After the data is collected, the writer will then carry out an analysis using Miles Huberman's analysis technique which includes three stages, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The validity of the research data was carried out by source triangulation. The results of the study were seen from the three stages in community empowerment, namely the stages of awareness, capacity building, and empowering in the Cikakak Tourism Village that had not gone as expected, as evidenced by the obstacles encountered at each stage of community empowerment. The inhibiting factors for community empowerment in the Cikakak Tourism Village are organization, human resources, and business capital.

Keywords: *Community Empowerment, Tourism Village, Management*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata yaitu aktivitas yang dilengkapi oleh lembaga serta layanan masyarakat, kewirausahaan, negara bagian dan lokal. Pariwisata merupakan penghasil devisa paling besar ketiga di Indonesia sesudah kelapa sawit dan batu bara. Salah satu strategi pembangunan ekonomi di

negara berkembang adalah melalui sektor pariwisata dimana dapat memberdayakan ekonomi masyarakat dan terdapat kesempatan peluang terciptanya lapangan pekerjaan baru seperti terbukanya kesempatan berwirausaha kuliner khas, jasa penginapan, jasa transportasi, dll. Torres dan Momsen (dalam Zainuri, 2021:138) menyatakan bahwa pariwisata merupakan peluang industri dalam menciptakan devisa,

memancing investasi asing, menaikkan pendapatan pajak, serta membuka lapangan pekerjaan baru apabila dapat digali dan dikelola dengan baik di setiap pariwisata yang ada di Indonesia sebagai negara kepulauan dan memiliki banyak keanekaragaman budaya lokal. Nwokorie (dalam Zainuri, 2021:138) berpendapat bahwa pariwisata adalah dimensi sosial dalam pengurangan kemiskinan di negara berkembang.

Pandemi Covid-19 yang muncul pada pertengahan Maret 2020 menyebabkan banyak sektor ikut terdampak, tidak terkecuali sektor pariwisata yang sangat terpuruk. Hal ini juga menyebabkan kemiskinan bertambah karena ketidaksiapan pemerintah Indonesia dalam menghadapi dampak yang timbul. Kabupaten Banyumas merupakan satu diantara lima kabupaten dan kota yang tergolong prioritas pengentasan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah, dengan tingkat kemiskinan ekstrem 6,83%. Hal ini karena kondisi geografis wilayah Banyumas yang luas, serta terdapat 29.000 kepala keluarga atau 109.000 jiwa penduduk yang menjadi perhatian pemerintah pusat.

Bersumber UU Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata mengamanatkan bahwa pembangunan pariwisata berperan dalam mengentaskan kemiskinan dengan peningkatan

kesempatan berusaha dan memberdayakan kemampuan masyarakat dalam menyelesaikan hambatan kehidupan dalam negeri, nasional maupun internasional. Kabupaten Banyumas merupakan kabupaten yang aktif dalam mengencarkan industri pariwisata. Saat ini industri pariwisata di Banyumas masih mengandalkan wisata alamnya dan beberapa budaya khas yang masih dapat dikembangkan karena memiliki ciri khas tersendiri.

Desa Wisata Cikakak menjadi satu-satunya desa wisata dengan kategori maju di Kabupaten Banyumas. Hal ini dibuktikan melalui Keputusan Bupati Banyumas Nomor /556/166/Tahun 2020. Selain itu, Desa Wisata Cikakak dijadikan sebagai desa adat oleh Kementerian Dalam Negeri di tahun 2011 sebagai bagian dari *pilot project* dalam usaha melestarikan adat dan budaya nusantara. Pengelolaan wisata di Desa Wisata Cikakak dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pengelola manajemen oleh BUMDes Mitra Usaha Sejahtera, sedangkan untuk pengelola lapangan oleh Pokdarwis Saka Tunggal. Selain itu, pengembangan Desa Wisata Cikakak melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung untuk memberdayakan masyarakat setempat melalui gotong royong memanfaatkan potensi wilayah desa

yang ada dengan tetap memperhatikan kearifan lokal agar dapat tetap dilestarikan. Tujuan lainnya adalah untuk mewujudkan kemandirian masyarakat.

Tabel 1
Data Pengunjung Desa Wisata Cikakak

No.	Tahun	Total Pengunjung	Omset
1.	2019	21.430 wisatawan	Rp 107.150.000
2.	2020	0	0
3.	2021	15.153 wisatawan	Rp 75.765.000
4.	2022	17.350 wisatawan	Rp 143.020.000

Sumber : Pokdarwis Saka Tunggal

Desa Cikakak diresmikan menjadi desa wisata pada tahun 2020. Bertepatan dengan waktu peresmiannya Desa Cikakak menutup seluruh lokawisata yang ada karena adanya kebijakan pembatasan sosial di tengah pandemi Covid-19. Bersumber tabel 1, meskipun di tahun 2021 Desa Wisata Cikakak mendapatkan beberapa penghargaan, namun jumlah pengunjung Desa Wisata Cikakak di tahun 2021 tidak mengalami peningkatan dari tahun 2019 dimana desa ini masih baru dirintis hingga menjadi desa wisata kategori maju. Meskipun di tahun 2022 jumlah wisatawan mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021, tetapi masih lebih rendah di bandingkan tahun 2019.

Pariwisata berbasis masyarakat merupakan metode pemberdayaan yang membutuhkan keikutsertaan masyarakat menjadi pelaku. Pemberdayaan masyarakat diawali melalui penciptaan suasana

maupun iklim yang membuat berkembangnya potensi masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Desa Wisata Cikakak dilakukan melalui beberapa tahapan. Pelibatan partisipasi masyarakat secara aktif melalui musyawarah dusun dan musyawarah desa tetapi dalam pelaksanaannya musyawarah dusun dan musyawarah desa belum dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti musyawarah desa dan musyawarah dusun masih rendah. Kemudian terdapat pelatihan peningkatan kapasitas dan pembentukan kelompok kerja.

Tabel 2
Kelompok Kerja Desa Wisata Cikakak

No.	Kelompok Kerja (Pokja)
1.	Pokja Saka Tunggal
2.	Pokja Embung Baron
3.	Pokja Wana Wisata
4.	Pokja Igir Pethek
5.	Pokja Religi dan Budaya Praja Laras
6.	Pokja Taman Kera
7.	Pokja Taman Edukasi

Sumber: BUMDes Mitra Usaha Sejahtera

Selain pokja tersebut, terdapat beberapa kelompok masyarakat yang turut diberdayakan seperti PKK, KWT Mugi Rahayu, Aza Craft dan UMKM penggerak Pasar Tradisional Antap.

Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya oleh (Wahyuni,

2018) yang berjudul “Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunung Kidul. Penelitian tersebut menganalisis pemberdayaan masyarakat melalui tiga strategi yakni pendayaan, penyadaran, dan pengkapasitasan berdasarkan teori dari Wrihatnolo dan Dwidjowiyoto. Perbedaan penelitian (Wahyuni, 2018) dengan penelitian yang hendak penulis laksanakan ialah lokus riset yang berbeda. Kesamaan penelitiannya terletak pada teori yang disampaikan oleh Wrihatnolo dan Dwidjowiyoto yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan dalam tahapan pemberdayaan masyarakat. Sehingga, penelitian tersebut memberikan manfaat referensi terhadap penelitian ini.

Penelitian lainnya yang dilaksanakan (Syaifudin & Ma'ruf, 2022) membahas peran pemerintah desa pada pemberdayaan serta pengembangan masyarakat lewat desa wisata. Teori yang digunakan yaitu teori peran pemerintah desa menurut Sahyana mencakup peran pemerintah desa dalam menjadi eksekutor kebijakan, pelaksana program, dan pembina. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah lokus riset serta teori yang diterapkan. Kesamaan penelitiannya ialah pembahasan mengenai desa wisata sehingga dapat menjadi

referensi terutama dalam melihat faktor pendorong serta penghambat pada proses pemberdayaan masyarakat.

B. Landasan Teori

Pemberdayaan Masyarakat

Administrasi publik sebagai *the work of government* mempunyai fungsi yang krusial pada sebuah negara terutama di layanan publik, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Frederick A. Cleveland (dalam Keban, 2014:15-16) menyatakan bahwasanya administrasi publik begitu penting untuk pemberdayaan masyarakat serta membangun demokrasi. Permendagri Nomor 71 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat memaparkan bahwasanya pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk menunjukkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Peran administrasi publik perlu dilaksanakan dengan efektif melalui inovasi, prinsip tata pemerintahan yang baik, penggunaan teknologi, penguatan lembaga publik, partisipasi, peningkatan kapasitas, desentralisasi, penyampaian layanan, pemberdayaan serta kemitraan di sektor publik serta swasta.

Keterkaitan manajemen dengan pemberdayaan masyarakat yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pemberdayaan masyarakat tidak bisa terlaksana secara benar apabila tidak dikelola melalui proses perencanaan yang partisipatif dan melibatkan semua elemen masyarakat. Manajemen merupakan tata kelola kegiatan dari awal hingga akhir yang menjadi dasar dari setiap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan yang pengaruhnya sangat besar pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tidak terlepas dari manajemen yang baik.

Berdasarkan etimologi pemberdayaan bersumber melalui kata “daya” yang berarti kekuatan. Singkatnya, pemberdayaan berarti memberdayakan kelompok yang lemah serta belum memiliki kemampuan dalam hidup mandiri, khususnya untuk mencukupi kebutuhan primer maupun pokok seperti sandang, pangan, serta papan. Pemberdayaan yang disampaikan oleh Ifa (dalam Juniarto & Laksmono, 2021:119) memiliki arti meningkatkan keberdayaan kelompok kurang mampu berdasarkan golongan, ras, jenis kelamin, lanjut usia, anak-anak serta remaja, difabel dan terkucilkan, serta masyarakat yang terjadi keduakan serta kesedihan lantaran kehilangan individu yang dicintai maupun yang mempunyai masalah pribadi dan keluarga.

Tahapan dalam pemberdayaan masyarakat menurut Wrihatnolo dan Dwidjowiyoto (dalam Wahyuni, 2018:87) yaitu:

1. Tahap Penyadaran

Tahap ini subjek dari pemberdayaan yaitu masyarakat diberi pengertian bahwasanya mereka memiliki potensi dan hak agar bisa mengembangkan potensinya. Di lain sisi, masyarakat diberi motivasi bahwasanya mereka harus mampu mengembangkan potensi yang dimiliki dimulai dari diri sendiri. Aktivitas ini dapat dipercepat dan dirasionalkan hasilnya dengan adanya usaha pendampingan atau fasilitator guna mencapai kemandirian. Sehingga, masyarakat mampu menciptakan iklim yang memungkinkan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki.

2. Tahap Pengkapasitasan

Tujuannya guna memampukan masyarakat baik individu maupun kelompok sehingga mereka mempunyai keterampilan untuk mengelola peluang yang akan diberikan. Tahapan pengkapasitasan dijalankan melalui upaya pemberian lokakarya, pelatihan, serta aktivitas serupa yang

tujuannya guna mengoptimalkan *life skill* masyarakat.

3. Tahap Pendayaan

Masyarakat diberikan peluang yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki melalui partisipasi aktif dan berkelanjutan yang ditempuh dengan memberikan peran yang lebih besar secara bertahap sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya serta diakomodasi aspirasinya serta dituntun untuk melakukan *self evaluation* terhadap pilihan dan hasil pelaksanaan atas pilihan tersebut.

Desa Wisata

Berdasarkan Wiendu Nuryanti (dalam Sugiarti, 2016:17) desa wisata ialah wujud integrasi atraksi, akomodasi, serta layanan pendukung, yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Chafid Fadeli (dalam Rindi, 2019:20) mengungkapkan bahwasanya desa wisata ialah wilayah pedesaan yang menyuguhkan kondisi yang mencerminkan keaslian desa melalui segi kehidupan sosial kebudayaan, kegiatan sehari-hari, adat istiadat, struktur desa, arsitektur bangunan, serta aspek-aspek guna dikembangkan menjadi wisata.

Prinsip pengembangan desa wisata menurut Sastrayuda (dalam Aliyah, 2020:21) adalah sebagai salah satu produk wisata pilihan yang bisa menunjang pembangunan desa secara berkelanjutan dan mempunyai prinsip manajemen sebagai berikut:

1. Menggunakan fasilitas publik terkait
2. Bermanfaat bagi khalayak setempat
3. Berskala kecil untuk memudahkan terjalinnya hubungan timbal balik terhadap masyarakat setempat
4. Mengikutsertakan masyarakat setempat
5. Pelaksanaan pengembangan produk desa wisata

Tolak ukur pengembangan pariwisata berbasis masyarakat ialah terwujudnya hubungan yang harmonis antara masyarakat setempat, sumber daya alam dan budaya serta wisatawan, yang tercermin dalam poin-poin berikut:

1. Adanya peningkatan antusiasme pembangunan masyarakat melalui pembentukan suatu wadah organisasi untuk menampung segala aspirasi masyarakat melalui sistem kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat lokal.
2. Adanya keberlanjutan lingkungan fisik yang ada di masyarakat

melalui konservasi, promosi, dan menciptakan tujuan hidup yang harmonis antara sumber daya alam, sumber daya budaya, dan sumber daya manusia.

3. Adanya keberlanjutan ekonomi melalui pemerataan dan keadilan dalam menikmati hasil-hasil pembangunan.
4. Membangun sistem yang menguntungkan masyarakat seperti sistem informasi yang dapat digunakan bersama.
5. Menjaga kepuasan wisatawan melalui pelayanan yang lebih baik, pengadaan informasi yang efektif, efisien, tepat guna, serta mengutamakan kenyamanan bagi wisatawan.

Desa wisata dibentuk untuk memberdayakan masyarakat agar dapat berperan sebagai pelaku dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian dalam menyikapi potensi pariwisata atau lokasi daya tarik wisata di wilayah mereka agar dapat berperan sebagai tuan rumah yang baik bagi para wisatawan yang berkunjung. Terdapat tiga cara dalam pengembangan pariwisata kerakyatan yaitu swadaya atau sepenuhnya dari masyarakat, kemitraan (melalui pengusaha besar/kecil), dan pendampingan oleh LSM atau perguruan tinggi selama masyarakat

dianggap belum mampu untuk mandiri (Aliyah, 2020:20).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memberikan gambaran pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Cikakak, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas. Situs penelitian berlokasi di Desa Wisata Cikakak. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan subjek penelitian yaitu Pokdarwis Saka Tunggal dan BUMDes Mitra Usaha Sejahtera sebagai informan kunci kemudian Pemerintah Desa Cikakak, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas, serta masyarakat sebagai informan pendukung.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan simpulan. Kualistas data yang digunakan menggunakan teknik triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemberdayaan Masyarakat di Desa Wisata Cikakak, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas

Pemberdayaan sebagai “proses” mengacu pada rangkaian tindakan atau langkah-langkah yang disusun secara sistematis dan kronologis, yang mencerminkan tahapan-tahapan di mana mereka yang kurang berdaya dapat lebih berdaya. Tujuan pengembangan pariwisata dengan memberdayakan masyarakat dapat terwujud manakala pembangunan tidak hanya berarti pembangunan ekonomi, tetapi juga pembangunan sosial dan budaya. Pariwisata dengan pengembangan desa wisata diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan sosial budaya masyarakat setempat, tetapi juga ketahanan sosial budaya bangsa dan negara.

Dari hasil penelitian di lapangan, pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Cikakak dilaksanakan melalui beberapa tahapan dari sebelum dibentuknya desa wisata hingga masyarakat mampu mengelola desa wisata. Beberapa tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

Tahap Penyadaran

Tahap penyadaran pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Cikakak diawali dengan pembentukan kelompok sadar wisata melalui pembinaan langsung dari Dinporabudpar Kabupaten Banyumas karena diberikan kepercayaan untuk mengikuti Gelar Desa Wisata Tingkat Jawa Tengah. Selain itu, Dinporabudpar

Kabupaten Banyumas membantu seluruh persyaratan yang dibutuhkan untuk mengikuti lomba tersebut salah satunya dasar hukum desa wisata dengan SK Dinas. Di akhir tahun 2019, terdapat pemutihan desa wisata baik yang sudah memiliki SK ataupun belum dengan perubahan kebijakan untuk dasar hukum setiap desa wisata harus mendapatkan SK Bupati yang harus melalui tiga tahapan yaitu tahap pencangan, tahap penilaian, dan tahap penetapan sehingga Pokdarwis Saka Tunggal dengan sigap melakukan tahap pencanangan kembali untuk mendapatkan SK Bupati. Setelah dilakukan penilaian oleh tim Dinporabudpar Kabupaten Banyumas yang bekerja sama dengan akademisi dan praktisi, Desa Wisata Cikakak ditetapkan menjadi desa wisata dengan kategori maju dengan dasar hukum Keputusan Bupati Banyumas Nomor /556/166/Tahun 2020 yang ditetapkan pada 20 Maret 2020.

Seiring berjalannya waktu, pengelolaan Desa Wisata Cikakak mengalami perubahan dengan berdasarkan keputusan kepala desa maka BUMDes Mitra Usaha Sejahtera menjadi pengelola manajemen yang bertanggung jawab langsung kepada pemerintah desa dan Pokdarwis Saka Tunggal menjadi pengelola lapangan.

Selain itu, pengelola Desa Wisata Cikakak melakukan kerja sama dengan berbagai pihak baik dari pemerintah yaitu Dinporabudpar Kabupaten Banyumas dan Pemerintah Desa Cikakak yang memiliki peran sebagai regulator, pendampingan kapasitas sumber daya manusia dan anggaran pengembangan sarana dan prasarana kemudian lembaga swasta yaitu Amir Krisan Florist sebagai investor lokal yang membangun taman bunga di Wisata Antap, agensi online PT Rebahan yang merupakan *platform* digital untuk memasarkan Desa Wisata Cikakak dan media sebagai wadah promosi. Selain itu juga terdapat kerja sama dengan akademisi yang berperan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pengelola Desa Wisata Cikakak. Perhutani juga terlibat dalam Wisata Antap terkait perizinan hutan pinus yang dikembangkan menjadi destinasi wisata bersama dengan Curug Antap dan Pasar Tradisional Antap.

Media sosialisasi yang digunakan kelompok sadar wisata bersama Pemerintah Desa Cikakak terkait pembentukan desa wisata kepada masyarakat melalui melalui pendekatan non formal terutama RT, RW, tokoh masyarakat, dan kelompok tertentu yang memiliki potensi dalam pengembangan pariwisata dengan tujuan agar masyarakat dapat berpartisipasi langsung dalam desa wisata. Meskipun

demikian belum ada sosialisasi secara formal terkait pemberdayaan masyarakat dalam desa wisata secara keseluruhan terhadap masyarakat Desa Cikakak. Pelibatan masyarakat dimulai dari hal kecil dengan kerja bakti wilayah wisata hingga terlibat langsung dalam pelestarian adat dan budaya yang ada di Desa Cikakak. Selain itu, Pokdarwis Saka Tunggal membentuk pokja-pokja sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dengan menggali potensi yang menjadi ciri khas Desa Cikakak menjadi daya tarik wisata.

Terdapat beberapa pokja yang terbentuk untuk mengembangkan potensi yang ada di Desa Wisata Cikakak baik untuk pengelola destinasi wisata Masjid Saka Tunggal, Makam Kiai Mustolih, dan Taman Kera dengan pokja Saka Tunggal kemudian pokja Embung Baron Sabang Mas, pokja wanawisata Antap dan pokja Aza Craft, UMKM kuliner khas, dan pokja kesenian Praja Laras. Masyarakat mendukung kegiatan desa wisata karena sebelum diresmikannya menjadi desa wisata pun Desa Cikakak sudah memiliki banyak pengunjung dengan tujuan melakukan wisata religi Masjid Saka Tunggal sebagai masjid tertua di Indonesia dan peziarah Makam Kiai Mustolih.

Meskipun demikian terdapat beberapa masyarakat yang kontra terhadap dibentuknya desa wisata karena tidak

semua wilayah di Desa Cikakak dapat menjadi wilayah pengembangan desa wisata karena tidak memiliki daya tarik wisata serta tidak semua masyarakat memiliki kemampuan dan keterampilan dalam pengelolaan desa wisata. Dari lima dusun yang ada di Desa Cikakak hanya empat dusun yang dapat dikembangkan menjadi wilayah wisata yaitu Kadus 2, Kadus 3, Kadus 4, dan Kadus 5 sedangkan untuk Kadus 1 tidak menjadi wilayah pengembangan desa wisata karena tidak memiliki daya tarik wisata.

Tahap Pengkapasitasan

Tahap pengkapasitasan dalam pemberdayaan masyarakat Desa Wisata Cikakak melibatkan berbagai pemangku kepentingan terutama Dinporabudpar Kabupaten Banyumas, Pemerintah Desa, dan akademisi dalam memberikan pendampingan dan pelatihan kepada pengelola Desa Wisata Cikakak dengan tujuan meningkatkan kapasitas dan kemampuan masyarakat. Pelatihan-pelatihan yang sudah diterima antara lain mencakup pelatihan manajemen homestay, pelatihan pemandu wisata, pelatihan kesenian, pelatihan pertanian, pelatihan pembuatan *website*, pelatihan Bahasa Mandarin, *workshop* penguatan kelembagaan desa wisata, dan pelatihan kerajinan.

Pendampingan dan pelatihan diberikan kepada pokja-pokja sesuai dengan tugasnya seperti pelatihan manajemen homestay ditujukan kepada ibu-ibu PKK selain itu Dinporabudpar Kabupaten Banyumas juga memberikan pendampingan NIB. Setelah pelatihan dan pendampingan terdapat 8 homestay yang terbentuk di Desa Wisata Cikakak yaitu homestay mandalagiri, homestay sumber rezeki, homestay danu, homestay leven, homestay mutia, homestay bions, homestay griya pakasa dan homestay griya hana.

Gambar 1
Homestay Mandalagiri Desa Cikakak



Sumber: Pokdarwis Saka Tunggal

Kedua, pelatihan pembuatan *website* yang ditujukan untuk pengelola Desa Wisata Cikakak dengan pendampingan dari STP NHI Bandung dan ITT Purwokerto. Akan tetapi dalam pengelolaan *website* untuk saat ini masih terkendala oleh sumber daya manusia yang masih belum terampil. Ketiga, pelatihan pertanian ditujukan kepada KWT Mugi Rahayu dengan pendampingan dari Dinperten Kabupaten Banyumas dan BPP

Kecamatan Wangon terdapat beberapa pelatihan yang sudah dijalankan mulai dari pembibitan, pembuatan persemaian, pelatihan pemanfaatan lahan pekarangan, dan pelatihan pembuatan arang sekam. KWT Mugi Rahayu saat ini sudah berhasil mengelola lahan pekarangan dengan menanam sayuran untuk konsumsi pribadi dan dijual.

Gambar 2
Pelatihan Pemanfaatan Lahan



Sumber: KWT Mugi Rahayu

Keempat, pelatihan Bahasa Mandarin ditujukan kepada Pokdarwis Saka Tunggal oleh akademisi Unsoed dengan tujuan pengelola wisata dapat memberikan pelayanan menggunakan Bahasa Mandarin karena terdapat peluang wisatawan dari Pabrik Semen yang dekat dengan Desa Cikakak dimana pekerjanya berasal dari Tiongkok. Kelima, pelatihan kesenian yang dilakukan oleh guru SMA N 1 Wangon dan warga setempat yang berprofesi sebagai guru dengan mengembangkan lagu Cikakak Ngrembaka, Tari Jaro Rojab, dan Tari Rewanda Bojana yang ditampilkan pada acara adat Desa Cikakak setiap tahunnya. Keenam, pelatihan pemandu wisata yang diselenggarakan oleh Dinporabudpar

Kabupaten Banyumas untuk anggota pokdarwis sehingga pengelola desa wisata dapat mengetahui SOP dalam melayani wisatawan. Ketujuh, *workshop* penguatan kelembagaan desa wisata yang diadakan oleh akademisi Unsoed mengungkap konsep pengelola Desa Wisata Cikakak yang terdiri dari pemerintah desa, pokdarwis, BUMDes, dan UKM untuk melakukan studi banding di Desa Wisata Banjarpanepen.

Pelatihan yang terakhir yaitu pelatihan kerajinan dan *souvenir* yang berawal dari kemampuan Bapak Warso (warga Desa Cikakak) memanfaatkan peluang kelapa gabuk yang tidak digunakan kemudian dimanfaatkan menjadi souvenir kepala monyet sebagai ciri khas Desa Wistaa Cikakak dengan membentuk pokja Aza Craft melalui pelibatan anggota KWT Mugi Rahayu dan ibu-ibu PKK. Selain itu, Aza Craft juga membuat kerajinan dari plastik yang sudah dipasarkan baik secara langsung kepada pengunjung maupun melalui media digital seperti instagram dan *website*.

Gambar 3
Souvenir Kepala Monyet Desa Cikakak



Sumber: Dokumentasi Penulis

Tahap Pendayaan

Tahap pendayaan adalah memberikan daya dan peluang kepada masyarakat Desa Wisata Cikakak sesuai dengan kualitas dan kecakapan yang dimiliki oleh masyarakat. Pada tahap ini peran masyarakat lebih besar sesuai dengan kapabilitasnya. Masyarakat Desa Wisata Cikakak yang diberdayakan memiliki perannya masing-masing dalam pengelolaan setelah diberikan sosialisasi serta pendampingan dan pelatihan. Pokja yang sudah terbentuk merupakan salah satu wujud dari pelibatan partisipasi masyarakat dengan tujuan untuk memberdayakan setiap kelompok.

Melalui kolaborasi dan kerja sama baik dari masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat Desa Wisata Cikakak berhasil mendapatkan beberapa prestasi yang pertama adalah Juara Harapan 3 Gelar Desa Wisata Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019. Kemudian Desa Wisata Cikakak mendapatkan bantuan dari Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah untuk pengembangan desa wisata. Bantuan keuangan yang diterima oleh Desa Wisata Cikakak merupakan bantuan keuangan yang diberikan secara bergilir untuk setiap desa wisata yang ada di Jawa Tengah sehingga tidak didapatkan setiap waktu.

Gambar 4
Ikon Kera Desa Cikakak



Sumber: Pokdarwis Saka Tunggal

Pengelola Desa Wisata Cikakak sudah mampu mengelola berbagai potensi yang ada dengan melibatkan masyarakat melalui kegiatan, *event*, maupun kelompok kerja sehingga Desa Wisata Cikakak berhasil memperoleh penghargaan Desa Wisata Terbaik Jawa Tengah Tahun 2021 dan masuk dalam 50 besar Anugrah Desa Wisata Indonesia.

Gambar 5
Juara Umum Gelar Desa Wisata Tingkat Jawa Tengah Tahun 2021



Sumber: Pokdarwis Saka Tunggal

Hal tersebut juga didukung dari berbagai macam bantuan yang diterima seperti bantuan keuangan dan APBDes yang dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas dan sarana prasarana. Desa Wisata Cikakak yang awalnya hanya mempunyai Masjid Saka Tunggal, Makam Kiai Mustolih sebagai peninggalan sejarah dan

menjadi destinasi religi saat ini sudah mengembangkan Wisata Antap dan Pasar Tradisional Antap yang didalamnya banyak masyarakat yang diberdayakan melalui pokja UMKM dengan berdagang kuliner khas di lokasi tersebut. Selain itu, juga terdapat Embung Baron Sabang Mas yang awalnya digunakan sebagai pengairan lahan pertanian dan dikembangkan menjadi wahana pemancingan.

Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata Cikakak, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas

Pengembangan dalam pemberdayaan masyarakat suatu desa wisata hingga mencapai tujuan yang diinginkan tidak terlepas dari faktor pendorong dan faktor penghambat yang mempengaruhinya. Faktor pendorong pertama pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Cikakak adanya potensi sumber daya alam yang sangat tinggi sehingga dimanfaatkan menjadi beberapa destinasi wisata alam seperti Taman Kera dan Wisata Antap. Taman Kera terletak di lingkungan Masjid Saka Tunggal dimana terdapat kawanan kera ekor panjang yang hidup berdampingan dengan masyarakat. Selain itu, kebiasaan adat dan tradisi masyarakat yang mengadakan acara Festival Rewanda Bojana setiap tahunnya yaitu memberi

makan kera sebagai wujud kepedulian terhadap sesama makhluk hidup menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Festival ini diselenggarakan setiap akhir tahun karena bertepatan dengan musim kemarau sehingga persediaan makanan kera di hutan sudah menipis.

Kedua, faktor pendorong pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Cikakak yaitu adanya kebijakan yang jelas. Bupati Banyumas melalui Dinporabudpar Kabupaten Banyumas mengeluarkan ketentuan dengan setiap desa wisata harus memiliki dasar hukum dengan SK Bupati yang di dapatkan melalui tahapan pencaangan kepada Dinporabudpar. Pengelola Desa Wisata Cikakak sudah melakukan pencaangan sehingga sudah mendapatkan dasar hukum Keputusan Bupati Banyumas Nomor /556/166/Tahun 2020 sebagai peresmian desa wisata dengan kategori maju dari berbagai potensi yang ada. Kebijakan tersebut juga akan ditinjau setiap empat tahun sekali oleh Dinporabudpar Kabupaten Banyumas melalui penilaian kembali bersama dengan akademisi dan praktisi. Hal tersebut tentunya menjadi dorongan pengelola untuk mempertahankan eksistensi desa wisata. Selain itu, terdapat kebijakan dari Keputusan Kepala Desa Cikakak Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pengelola

Desa Wisata Cikakak Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas yang mendukung setiap pengelola Desa Wisata Cikakak untuk bergerak karena sudah memiliki payung hukum resmi dari desa. Regulasi tersebut mengesahkan pengelola Desa Wisata Cikakak yang merupakan gabungan dari BUMDes, pokdarwis, dan pokja-pokja yang ada serta menjelaskan tugas dan fungsi pengelola desa wisata.

Ketiga, ditinjau dari aspek organisasi atau pengelola dalam desa wisata menjadi faktor penghambat bagi jalannya Desa Wisata Cikakak. Hal tersebut dikarenakan adanya konflik internal antara Pokdarwis Saka Tunggal dan BUMDes sebagai pengelola manajemen desa wisata. Keempat, dilihat dari sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan Desa Wisata Cikakak menjadi faktor penghambat pemberdayaan masyarakat karena terdapat permasalahan dalam pelestarian adat dan budaya dalam kesenian yang masih kurang diminati generasi muda. Selain itu, terkait digitalisasi masyarakat belum mampu mengembangkan secara maksimal untuk tujuan promosi wisata ataupun memasarkan produk dagangannya.

Terakhir modal usaha masih menjadi faktor penghambat pemberdayaan masyarakat Desa Wisata Cikakak dikarenakan pendapatan dan pengeluaran pengelolaan yang masih belum surplus. Hal

tersebut menyebabkan keterbatasan dalam melakukan perawatan fasilitas yang tersedia. Salah satunya adalah Pasar Tradisional Antap yang saat ini berhenti beroperasi karena tempat penukaran koin dan tempat para pedagang menjajakan dagangannya rusak.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Cikakak belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut dibuktikan dari tiga tahapan pemberdayaan masyarakat yaitu tahap penyadaran, tahap pengkapasitasan, dan tahap pendayaan yang masih ditemuinya beberapa kendala.

- a. Pada tahap penyadaran kendala yang ditemui yaitu belum adanya sosialisasi terkait pembentukan desa wisata secara formal baik oleh pengelola Desa Wisata Cikakak maupun Pemerintah Desa Cikakak. Selain itu, meskipun masyarakat mendukung kegiatan desa wisata tetapi terdapat masyarakat yang kontra dengan dibentuknya desa wisata karena tidak semua wilayah di Desa Cikakak dapat dikembangkan menjadi wilayah pengembangan desa wisata.

- b. Tahap kedua dari pemberdayaan masyarakat Desa Wisata Cikakak yaitu tahap pengkapasitasan dimana pada tahap ini masih terdapat kendala yang dibuktikan dengan tingkat partisipasi masyarakat yang mengikuti kegiatan pendampingan dan pelatihan hanya beberapa individu ataupun kelompok yang aktif. Pengelola Desa Wisata Cikakak belum mampu mengembangkan kemampuan digitalisasi untuk media promosi secara berkelanjutan yang dibuktikan belum berkembangnya website dan media sosial lainnya seperti instagram. Selain itu, kendala dari kurangnya keterlibatan generasi muda dalam pelestarian adat dan seni yang dimiliki Desa Wisata Cikakak.
- c. Tahap ketiga yaitu tahap pendayaan pada tahap ini kendala yang dihadapi pengelola Desa Wisata Cikakak adalah pengeluaran lebih besar dari pendapatan yang menyebabkan beberapa fasilitas yang sudah terbangun di destinasi Desa Wisata Cikakak mengalami kerusakan. Hal tersebut menyebabkan Pasar Tradisional Antap sebagai wadah UMKM berjualan setiap hari minggu pagi di

tutup sementara semenjak akhir tahun 2022.

Pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Cikakak belum berjalan optimal karena terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhinya.

- a. Faktor penghambat yang pertama yaitu organisasi atau lembaga yang mengelola Desa Wisata Cikakak dimana terdapat konflik internal antar anggota pengelola maupun antar pemangku kepentingan dan tumpang tindih jabatan. Hal tersebut karena kurangnya kolaborasi antara Pokdarwis Saka Tunggal sebagai pengelola lapangan Desa Wisata Cikakak dan BUMDes yang menjadi pengelola manajemen Desa Wisata Cikakak. Selain itu, ketua pokdarwis yang juga menjadi kepala divisi pariwisata BUMDes menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat.
- b. Faktor penghambat kedua dilihat dari aspek sumber daya manusia dikarenakan masyarakat yang terlibat aktif dalam pengelolaan dan kegiatan desa wisata hanya beberapa individu dan kelompok tertentu serta kurang berkembangnya kemampuan pengelola Desa Wisata Cikakak dalam melakukan promosi secara

digital dan masih minimnya keterlibatan generasi muda dalam pelestarian adat dan budaya.

- c. Terakhir, modal usaha masih menjadi faktor penghambat pemberdayaan masyarakat karena masih belum sesuai dengan pengeluaran dan pemasukan Desa Wisata Cikakak sehingga tidak bisa dilakukan perawatan fasilitas yang tersedia di setiap destinasi.

SARAN

Pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan merupakan aspek penting untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri. Agar pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Cikakak dapat terlaksana lebih baik maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

Untuk meningkatkan kualitas setiap tahapan pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Cikakak berjalan lebih optimal maka penulis memberi saran sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan kesadaran pemberdayaan masyarakat penulis memberi saran untuk diadakannya sosialisasi secara formal pembentukan Desa Wisata Cikakak sehingga masyarakat mengetahui pengelolaan dan pengembangan

terkait desa wisata secara lebih jelas dan detail.

- b. Untuk meningkatkan tahapan pengkapasitasan dalam pemberdayaan masyarakat maka dibutuhkan lebih banyak melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan Desa Wisata Cikakak sehingga tidak hanya individu ataupun kelompok tertentu yang aktif. Masyarakat perlu meningkatkan pemanfaatan teknologi seperti website dan media sosial secara maksimal dan berkelanjutan yang dapat digunakan sebagai media promosi Desa Wisata Cikakak kepada khalayak ramai.
- c. Untuk meningkatkan tahap pendayaan dalam pemberdayaan masyarakat Desa Wisata Cikakak seyogyanya pengelola mengedepankan transparansi dan menjalin komunikasi dengan masyarakat dalam pengembangan dan permasalahan yang dihadapi Desa Wisata Cikakak.

Untuk memperbaiki beberapa faktor penghambat yang masih di hadapi dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Cikakak, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. Perlunya peningkatan sinergitas dan kolaborasi antara pengelola Desa

Wisata Cikakak dalam mengambil keputusan sehingga terjadinya musyawarah dengan mufakat.

- b. Pengelola Desa Wisata Cikakak dapat menggandeng karang taruna untuk menggerakkan generasi muda dalam pelestarian adat dan budaya.
- c. Pengelola dapat membuat anggaran khusus untuk perbaikan fasilitas destinasi yang dapat dilakukan dengan kerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Juniarto, P. A., & Laksmo, B. S. (2021). Pemberdayaan Kelompok Pengurus E-Warong Kube PKH Harapan Jaya Kelurahan Manggarai Kecamatan Tebet Jakarta Selatan Melalui Pemanfaatan Teknologi dan Informasi. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, 3(2), 116-125.
- Keban, Y. T. (2014). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori, dan Isu. Yogyakarta: *Gava Media*.
- Rindi, T. A. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus Desa Wonokarto, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung). *Skripsi*.
- Sugiarti, R., Aliyah, I., & Yudana, G. (2016). Pengembangan Potensi Desa Wisata di Kabupaten Ngawi. *Cakra Wisata*, 17(2).
- Syaifudin, M. Y., & Ma'ruf, M. F. (2022). Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata (Studi di Desa Jurug, Kabupaten Ponorogo). *Publika*, 10(2), 17-30.
- Wahyuni, D. (2018). Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 9(1), 83-100.
- Zainuri, T. H. (2021). Dampak Pariwisata Terhadap Tingkat Kemiskinan di Lima Negara ASEAN. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, 8(2), 138-144.